

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 *Fiscal Stress*

Tidak ada satu definisipun tentang fiscal stress yang diterima secara universal (Arnett, 2011). Sehingga dapat dikatakan bahwa para peneliti sering menciptakan definisi sendiri untuk mengakomodasi fokus penelitian atau memodifikasi definisi yang digunakan oleh penelitian sebelumnya antara lain Jimenez 2009, Rubin and Willoughby 2009, Sobel and Holcombe (1996), Maag and Merriam (2007) (Arnett, 2011). *Fiscal stress* merupakan ketidakmampuan pemerintah (daerah) untuk memenuhi kewajiban finansial baik jangka pendek maupun jangka panjangnya termasuk kemampuan meningkatkan penerimaan daerahnya ataupun menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan warga masyarakatnya (Arnett, 2011).

Arnett (2012) *fiscal stress* didefinisikan sebagai kondisi dimana pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang dan pemerintah juga tidak mampu meningkatkan penerimaan daerahnya atau menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. *Fiscal stress* dapat diindikasikan ketika pengeluaran daerah dalam hal ini belanja modal mengalami peningkatan, namun jika tidak diimbangi dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal ini dapat memicu terjadinya kondisi fiscal stress (Shamsub & Akoto, 2004). Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mengurangi terjadinya fiscal stress maka pemerintah daerah harus mengurangi laju pertumbuhan pengeluaran sejalan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah. Di mana fiscal stress semakin tinggi apabila adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan pribadi (potensi dalam daerah) untuk membiayai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah yang berpotensi dan

kesiapan daerah dalam mengelolanya menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi.

Menurut Shamsub & Akoto (2004) mengelompokkan penyebab timbulnya *fiscal stress* ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan *fiscal stress*. Penyebab utama terjadinya *fiscal stress* adalah kondisi ekonomi seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi.
- b. Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri sebagai penyebab utama timbulnya *fiscal stress*.
- c. Menerangkan *fiscal stress* sebagai fungsi politik dan faktor-faktor keuangan yang tidak terkontrol.

Shamsub & Akoto, (2004) menemukan bahwa kemunduran industri menjadikan berkurangnya hasil pajak tetapi pelayanan jasa meningkat, hal ini dapat menyebabkan *fiscal stress* sebagian dari peran ketidak efisienan birokrasi, korupsi, gaji yang tinggi untuk pegawai, dan tingginya belanja untuk kesejahteraan.

Pada saat *fiscal stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan Akoto, 2004). Sehingga, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *fiscal stress*. Upaya pajak (Tax Effort) adalah diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) pajak daerah dengan PDRB (Saruç & Sagbaş, 2008). Upaya pajak menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam hal ini merupakan seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut. Upaya pajak yang tinggi dapat mencerminkan tingkat *fiscal stress* yang lebih besar dimana permintaan jasa tertentu melebihi sumber atau pendapatan yang ada. Jika PDRB suatu daerah mengalami peningkatan, maka kemampuan daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak juga akan meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat

Ada tiga pendekatan yang umum digunakan dalam mengukur kesehatan fiskal , (Reschovsky, 2004) yaitu:

- a. Pendekatan pertama ditekankan pada posisi surplus atau defisit (pendapatan dikurangi pengeluaran).
- b. Pendekatan kedua untuk membandingkan pemerintah daerah yang didasarkan pada penetapan indikator tekanan fiskal (indikator ekonomi, sosial, demografi, dan indikator keuangan).
- c. Pendekatan ketiga memfokuskan pada indikator tekanan keuangan. Fiscal stress dapat diukur melalui peningkatan PAD yang dirumuskan dengan realisasi PAD dibandingkan dengan potensi PAD dibagi 100% (Rechovsky, 2004).

Berbeda halnya dengan yang dikaji oleh Arnett (2011), terdapat 5 (lima) kategori besar pengukuran fiscal stress di tingkat daerah (*state*) yaitu: defisit anggaran (*budget deficits*), saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (*year-end unreserved budget balance*), peningkatan pajak relatif terhadap trend pengeluaran (*tax increases relative to spending trends*) dan rasio keuangan (*financial ratios*).

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah atau yang biasa disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrick, 2017). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Firdausy, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan

pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Firdausy, 2017). Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru (Firdausy, 2017).

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu pihak dalam rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Selain itu otonomi daerah mempunyai tujuan:

- a. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.
- b. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
- d. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah (Firdausy, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Halim, 2008). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dana perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan periode nasional.

2.3 Belanja Modal

Menurut Halim (2008) Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga disebutkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Halim (2008) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam Belanja Modal adalah:

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Belanja Aset Tetap lainnya
- f. Belanja Aset lainnya.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahn (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan perencanaan, pengawasa dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bualan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan, dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, bukubuku, dan jurnal ilmiah.

2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Malau & Pulungan, 2019). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam satu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut (Soemitro, 2017) dibagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) PDRB atas Dasar Harga Konstan: menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung memakai harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.
- 2) PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Riil): menggambarkan nilai tambahan barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Soemitro, 2017).

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006)Ketiganya adalah:

- a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- c. Kemajuan teknologi

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

- 1) Pertumbuhan (*growth*), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.
- 2) Pemerataan (*equity*), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan.
- 3) Berkelanjutan (*sustainability*), sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

Menurut Kuznets (2011), “terdapat lima pola penting pertumbuhan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi moderen. Kelima pola tersebut meliputi: penemuan ilmiah atau penyempurnaan pengetahuan teknik, investasi, inovasi, penyempurnaan dan penyebarluasan yang biasanya diikuti oleh penyempurnaan. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Schumpeter bahwa inovasi (pembaharuan) sebagai faktor teknologi yang penting dalam pertumbuhan ekonom”.

2.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap *Fiscal Stress*

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD yang sah. Sementara Arnett (2011) mendefinisikan *fiscal stress* sebagai ketidakmampuan pemerintah (daerah) untuk memenuhi kewajiban finansial baik jangka pendek dan jangka panjangnya termasuk ketidakmampuan meningkatkan penerimaan daerahnya ataupun menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan warga masyarakatnya.

Kondisi *fiscal stress* menyebabkan Pemerintah Daerah berada pada kondisi yang belum sepenuhnya mampu mendanai pembangunan yang ada di daerah. Artinya, Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari Pusat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum menggali sumber-sumber penghasilan yang ada di daerah secara optimal. Oleh sebab itu kondisi *fiscal stress* ini menyebabkan Pemerintah Daerah wajib menggali sumber-sumber penghasilan yang berpotensi untuk dipungut sebagai Pendapatan Asli Daerah. Dengan peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat mendanai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tanpa mengandalkan bantuan dari Pusat, sehingga kondisi *fiscal stress* tersebut akan berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Halim (2004) menunjukkan bahwa *fiscal stress* dapat mempengaruhi APBD suatu daerah. Hal tersebut dibuktikan dari adanya pergeseran (kenaikan/penurunan) dari komponen penerimaan dan pengeluaran APBD.

Terkait dengan hal itu, penelitian Halim (2004) memberikan fakta empirik bahwa kondisi *fiscal stress* yang terjadi di tahun 1997 ternyata secara umum tidak menurunkan peran PAD terhadap total anggaran penerimaan/pendapatan daerah. Sedangkan Muda (2012) menunjukkan bahwa Pertumbuhan PAD memiliki dampak atas *Fiscal Stress* suatu daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan penerimaan daerah (dalam hal ini PAD) mempengaruhi tingkat *Fiscal Stress* pada suatu daerah. Adanya perubahan (kenaikan/penurunan) dari komponen penerimaan daerah akan menyebabkan perubahan tingkat *Fiscal Stress* yang dialami oleh daerah tersebut.

2.6 Pengaruh Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress*

Dalam menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah harus lebih meningkatkan pelayanan publiknya. Upaya ini akan terus mengalami perbaikan sepanjang didukung oleh tingkat pembiayaan daerah yang memadai. Alokasi belanja yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik diharapkan memberikan timbal balik berupa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, baik yang berasal dari retribusi, pajak daerah maupun penerimaan lainnya.

Muda (2012) memberikan gambaran empirik bahwa terjadi perbedaan tingkat pembiayaan sesudah era otonomi daerah lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Perubahan pembiayaan ini lebih banyak disebabkan adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik yang ditunjukkan dengan peningkatan alokasi ataupun terjadi pergeseran belanja untuk kepentingan-kepentingan pelayanan publik secara langsung, dalam hal ini belanja pembangunan.

Belanja pembangunan seperti pembangunan infrastruktur pada jangka pendek akan memperbesar anggaran belanja daerah. Hal ini jika tidak diimbangi dengan penerimaan yang cukup signifikan (besar) maka dapat menimbulkan *Fiscal Stress* yang cukup serius, mengingat *Fiscal Stress* di sini dicerminkan adanya ketidakseimbangan anggaran penerimaan dengan pengeluaran. Pada jangka panjang dengan peningkatan kualitas infrastruktur suatu daerah pada gilirannya mempunyai harapan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan belanja daerah dapat mempengaruhi *Fiscal Stress*.

2.7 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Fiscal Stress*

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Sidik, 2002). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik. PAD berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi (diukur dengan PDRB) di daerah (Brata, 2004). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai aktifitasnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga akan lebih tinggi. Pada gilirannya, tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula. Pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu.

Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003). Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Sidik (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pada gilirannya harapan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat terpenuhi. Dalam hal ini melalui peningkatan PAD maka pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB memberikan pengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

2.8 Kajian Empiris

Berdasarkan dari beberapa teori diatas, maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu guna untuk mendukung penelitian ini. Fristanto (2015) melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis pengaruh PAD, PDRB, pertumbuhan belanja modal terhadap *fiscal stress* menggunakan analisis regresi data panel *fixed effect model* mendapatkan hasil penelitian pertumbuhan PAD dan pertumbuhan PDRB tidak berdampak signifikan terhadap *fiscal stress*, hanya pertumbuhan belanja modal saja yang memiliki dampak negatif pada *fiscal stress*. Shamsub dan Akoto (2004) melakukan penelitian tentang *state and local fiscal stress structures and fiscal stress* dengan pendekatan *pooled cross-sectional time-series* mendapatkan hasil penelitian diversifikasi pendapatan daerah dan desentralisasi fiskal dapat digunakan sebagai langkah untuk mengurangi tekanan fiskal.

Muda (2012) juga melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan/pembangunan belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi (PRDB) terhadap tekanan fiskal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan menggunakan metode analisis regresi berganda dan model efek acak, yang mendapatkan hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan/perkembangan belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi (PRDB) berpengaruh signifikan terhadap tekanan fiskal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara. Sedangkan Septira et al., (2019) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan PDRB berpengaruh terhadap *fiscal stress* dengan menggunakan metode analisis regresi data panel yang mendapatkan hasil PAD dan pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan PDRB berpengaruh terhadap *fiscal stress* sedangkan pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Dalam diatas tidak sejalan dengan penelitian Gunara & Halim (2017) melakukan penelitian bertujuan untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan PAD, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan belanja modal terhadap tekanan fiskal di provinsi

Kalimantan Tengah dengan analisis regresi berganda yang mendapatkan hasil secara simultan variabel pertumbuhan PAD, pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap fiscal stress di provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa secara parsial, hanya pertumbuhan pendapatan asli daerah yang berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress.

Abdullah et al. (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah analisis jalur (*path analysis*) PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Alexiou (2009) meneliti tentang *government spending and economic growth: econometric evidence from the south eastern euro* dengan menggunakan regresi data panel yang berbeda pada tujuh ekonomi transisi di Eropa Tenggara yang mendapatkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah untuk pembentukan modal, bantuan pembangunan, investasi swasta dan keterbukaan perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan populasi sebaliknya, ditemukan secara statistik tidak signifikan.

Muryawan & Sukarsa (2016) yang melakukan penelitian *fiscal stress* dengan menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*) mendapatkan hasil penelitian bahwa secara tidak langsung variabel desentralisasi fiskal dan variabel stress fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kinerja keuangan daerah, variabel desentralisasi fiskal dan stress fiskal berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, dan variabel kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian Jin & Zou (2005) tentang *fiscal decentralization, revenue and expenditure assignments and growth in China* menggunakan metode regresi data panel

mendapatkan hasil penelitian, alokasi pendapatan dan belanja di tingkat daerah menguntungkan efisiensi alokatif, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Jimanez (2009) yang menulis penelitian deksriptif tentang *fiscal stress and allocation of expenditure responsibilities between state and local government*, mengemukakan bahwa secara umum sektor publik negara bagian dan lokal cenderung menjadi lebih banyak terdesentralisasi ketika pemerintah negara bagian berada dalam kondisi fiskal yang sulit.

Sanjaya et al., (2021) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, menggunakan regresi data panel Hasil pengujian bahwa pertumbuhan belanja modal berpengaruh terhadap *fiscal stress*, sedangkan pertumbuhan PAD dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Sedangkan Sawitri, dkk (2020) menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara langsung memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi regional sementara kemandirian keuangan secara langsung tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional, dan belanja modal tidak dapat memediasi pengaruh pendapatan lokal dan kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.9 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

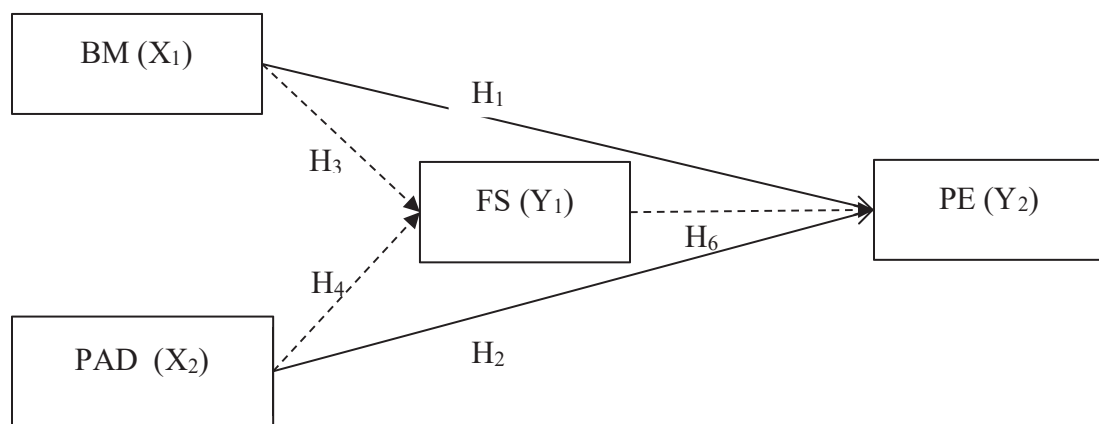
2.9.1 Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir menurut Sugiyono (2017) ialah bentuk dari konseptual terkait teori yang saling berkaitan dari bermacam – macam faktor yang diidentifikasi sesuatu masalah yang dirasa penting. Penulis mengkaji penelitian ini tentang pengaruh pertumbuhan belanja modal dan pertumbuhan pendapatan asli daerah terhadap *fiscal stress* melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Kondisi *fiscal stress* menyebabkan Pemerintah Daerah berada pada kondisi yang belum sepenuhnya mampu mendanai pembangunan yang ada di daerah. Oleh sebab itu kondisi *fiscal stress* ini menyebabkan Pemerintah Daerah wajib menggali sumber-sumber penghasilan yang berpotensi untuk dipungut sebagai Pendapatan Asli

Daerah. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai aktifitasnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga akan lebih tinggi. Maka, pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Berikut adalah kerangka konseptual pada penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.9.2 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) hipotesis jawaban sementara terhadap rumusan masalah, yang telah diolah sedemikian rupa dan diuraikan dalam bentuk pernyataan. Berdasarkan pertanyaan penelitian dan kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat.
- H₂ : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.
- H₃ : Belanja modal berpengaruh terhadap *fiscal stress* di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

- H₄ : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *fiscal stress* di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.
- H₅ : Belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui *fiscal stress* di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.